



LAPORAN

Layanan Informasi Publik

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat

Semester I Tahun 2025



Disusun oleh :

TIM PPID BAPPEDA JABAR
Bandung, 2025

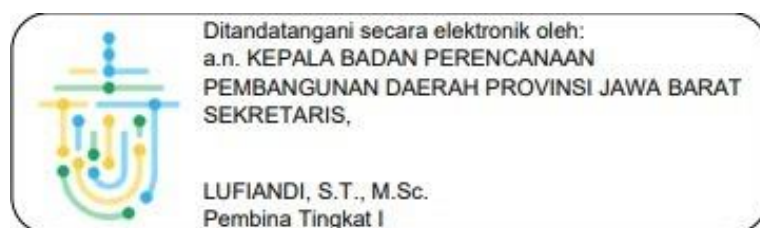
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diutamakan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses, sehingga pemenuhan hak untuk memperoleh informasi diatur dalam suatu kebijakan publik.

PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 telah banyak dinamika dan pengembangan yang dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Setiap tahun kegiatan layanan informasi public dituangkan dalam sebuah laporan tahunan dan secara rutin diumumkan kepada public dan disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Melalui laporan tahunan ini, tidak hanya sekedar melaksanakan amanat Pasal 4 poin j Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, tetapi juga menjadi salah satu wujud akuntabilitas PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,



DAFTAR ISI

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik..... 1

 Latar Belakang..... 1

 Kebijakan Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi..... 1

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 3

Program dan Kegiatan Ppid Pelaksana Bappeda Jabar 4

 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik..... 6

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik 6

 Fasilitas Desk PPID 6

 Sarana Bagi Penyandang Disabilitas..... 7

Alur Permohonan Informasi Publik Bappeda Jabar 9

Anggaran PPID 10

Rincian Pelayanan Informasi Publik 11

Kendala Internal dan Eksternal Layanan Informasi Publik..... 13

Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut..... 13

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Program dan Kegiatan tahun 2024 PPID Pelaksana Bappeda Jabar.....	4
Tabel 2	Jumlah Permohonan Informasi.....	11
Tabel 3	Rata-rata waktu menjawab Permohonan Informasi.....	11
Tabel 4	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan, Dikabulkan Sebagian, Ditolak, dan Alasan Ditolak berdasarkan Bulan tahun 2024.....	11
Tabel 5	Jumlah Permohonan Keberatan serta Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada KI, PTUN, dan MA berdasarkan Bulan tahun 2024....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.....	3
Gambar 2	Ruangan Khusus Layanan PPID Bappeda Jabar.....	7
Gambar 3	Backend Office PPID Bappeda Jabar.....	7
Gambar 4	Jalur Khusus untuk Kursi Roda.....	7
Gambar 5	Parkir Khusus Disabilitas.....	8
Gambar 6	Panduan Bahasa Isyarat Abjad & Ketentuan Layanan Permohonan Informasi dengan Braille	8
Gambar 7	Display Maklumat Pelayanan, Permohonan Informasi, Pengaduan.....	8
Gambar 8	Tampilan Website Bappeda Jabar yang Telah Dilengkapi dengan Audio untuk memudahkan Teman Netra Bappeda Jabar.....	8

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LATAR BELAKANG

Informasi menjadi kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh setiap orang dalam kegiatan, khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Hal tersebut selaras dengan pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diutamakan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses, sehingga pemenuhan hak untuk memperoleh informasi diatur dalam suatu kebijakan publik. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi salah satu produk hukum Indonesia yang memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang dikecualikan.

UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapatkan akses informasi serta wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unit kerjanya. Pentingnya tugas dan tanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik, menjadikan PPID sebagai salah satu prioritas dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Laporan Layanan Informasi Publik Semester I Tahun 2025 menggambarkan upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan ekosistem informasi yang transparan, responsif, dan inklusif. Melalui penilaian kinerja, evaluasi, dan umpan balik masyarakat, laporan ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk terus meningkatkan layanan informasi publik guna memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin cerdas dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan negara.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki visi Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Untuk mencapainya, terdapat 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

- 1) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
- 2) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;

- 3) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
- 4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; serta
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Aspek kolaborasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan diperlukan untuk membuka ruang bagi publik untuk mengakses informasi publik yang interaktif dari masyarakat. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, mulai Tahun 2021 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyesuaian payung hukum guna menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai aturan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225 Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sesuai Keputusan Gubernur di atas, pembagian struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) menjadi dua, yaitu PLID Utama dan PLID Pembantu. PLID Utama terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID Utama, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, PLID Pembantu terdiri dari Atasan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana, dan 3 (tiga) bidang pendukung yaitu Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

Atasan PPID Pelaksana adalah Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Biro Umum, dan Direktur pada BUMD. Dalam menjalankan fungsi teknis, PPID Utama memiliki tugas sebagai berikut :

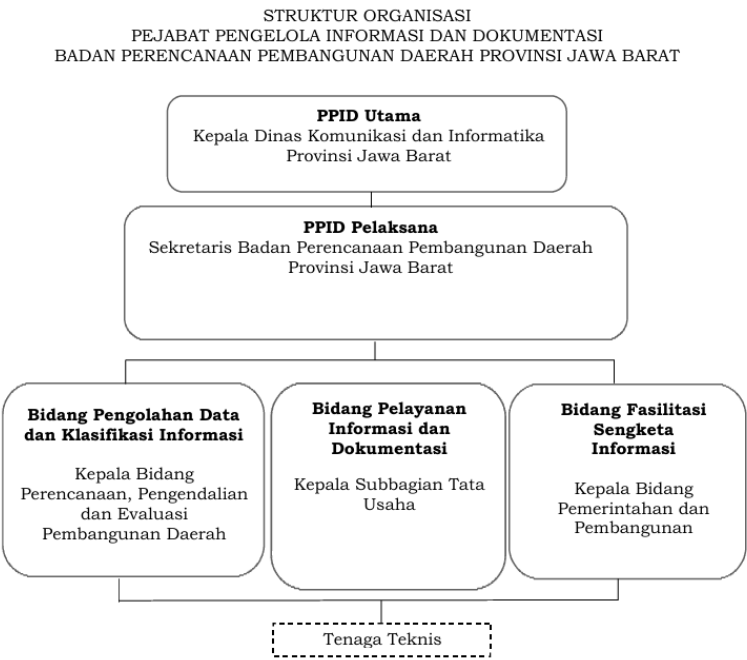
- 1) Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 2) Bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
- 3) Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 4) Melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersama dengan Tim Pelayanan Pertimbangan Informasi.

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat melingkupi penyediaan dan penyajian informasi publik berdasarkan pada kategori informasi publik sebagaimana komitmen dalam pengimplementasian Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menjadi payung hukum bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi public. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 067/ Kep.225-Diskominfo/ 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat menjalankan tugasnya pada tahun 2025 sebagaimana Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1647/HK.02.03/SEKRE tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 April 2025. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Pembantu didukung oleh Tim Pengolahan Data dan Klasifikasi, Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Tim Fasilitasi Sengketa Informasi.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Tugas dan PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat diantaranya:

1. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan pimpinan.
4. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja dalam Perangkat Daerah;
5. Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan;
6. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana;
7. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat.
9. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PLID masing masing unit kerja dan melaporkannya kepada Atasan PPID Pelaksana;
10. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik;
11. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
12. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

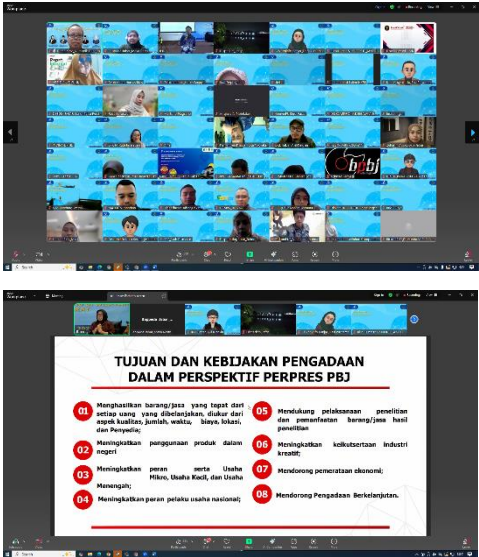
Dalam melaksanakan kewajiban sebagai badan publik, PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai PPID Pelaksana senantiasa mengedepankan kemudahan akses terhadap informasi publik. Layanan permohonan Informasi dapat diakses secara langsung oleh publik melalui desk pelayanan informasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, atau dapat menyampaikan permohonan secara elektronik melalui email bappeda@jabarprov.go.id maupun media social official Bappeda Jabar.

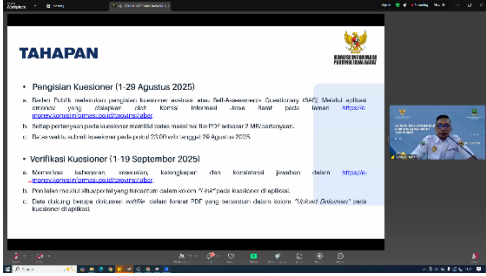
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID PELAKSANA BAPPEDA JABAR

Terdapat beberapa program dankegiatanyangdilaksanakanoleh PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bappeda Jabar pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Program dan Kegiatan tahun 2025 PPID Pelaksana Bappeda Jabar

No	Jenis Kegiatan	Frekuensi	Keterangan
	Rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Sosialisasi Internal		Kegiatan rapat, koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID di lingkup internal PPID Bappeda Jabar 19 Agustus 2025

			
	Koordinasi PPID Jawa Barat		Senin, 23 Desember 2024, secara daring mengikuti Rapat Koordinasi PPID Provinsi Jawa Barat  Selasa, 24 Juni 2025, Bimbingan Teknis Pengelolaan Inormasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagi PPID/Pelaksana PPID di Wilayah Indonesia Barat  Jumat, 18 Juli 2025, Visitasi dan Pembinaan PPID oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat 

		Selasa, 29 Juli 2025, Sosialisasi E-Monev KIP Jabar oleh Komisi Informasi melalui zoom meeting.  
--	--	--

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Bappeda Jabar dilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 2193/Hk.02/Diskominfo Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

PPID Bappeda Jabar melayani permohonan informasi publik setiap hari kerja mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga pukul 13.00 pada Hari Senin–Kamis dan pukul 09.00 hingga pukul 15.00 pada Hari Jumat dengan waktu istirahat pukul 11.30 hingga pukul 13.00 . Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi 10 (sepuluh) hari kerja ditambah satu kali 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis.

SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Saluran layanan informasi publik yang telah disediakan oleh PPID Bappeda Provinsi Jawa Barat guna memfasilitasi pemohon untuk mengajukan permohonan informasi, yaitu melalui petugas di ruang layanan informasi publik, email bappeda@jabarprov.go.id, serta laman permohonan informasi PPID pada website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (<http://bappeda.jabarprov.go.id/>).

Fasilitas Desk PPID

Ruang PPID terletak di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Lantai 2, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung. Ruang layanan dilengkapi dengan meja panjang untuk menerima pemohon data.



Gambar 2. Ruang Khusus Layanan PPID Bappeda Jabar

Pengelolaan layanan informasi dilakukan dalam Ruang Humas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat , Gedung Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Lantai 2. Backend Office berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar tim Pengelola PPID.



Gambar 3. Backend Office PPID Bappeda Jabar

Di ruang ini juga, dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan yang terkait dengan PPID seperti Surat Keputusan, Daftar Informasi Publik, dan SOP Permohonan Data Layanan Informasi PPID.

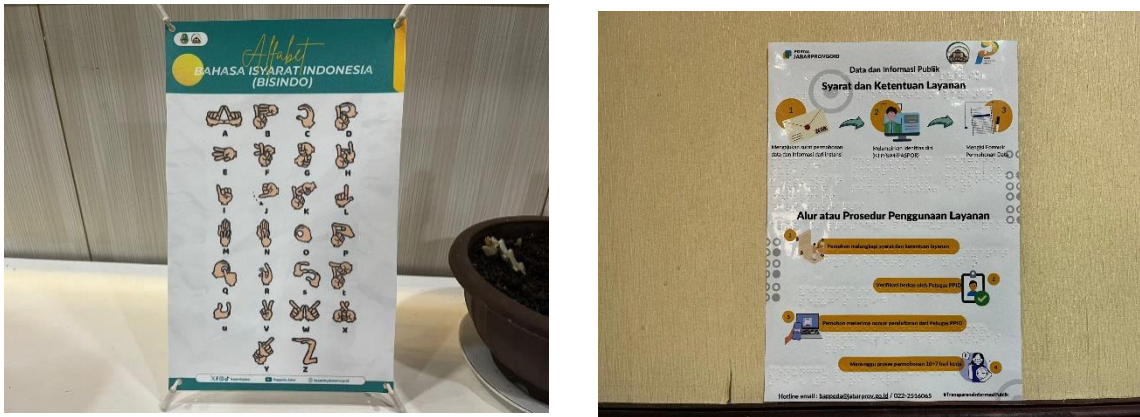
Sarana Bagi Penyandang Disabilitas



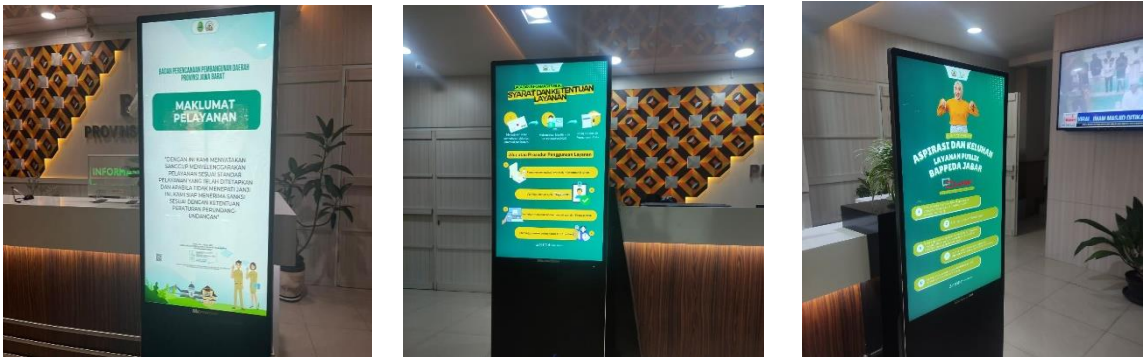
Gambar 4. Jalur Khusus untuk Kursi Roda



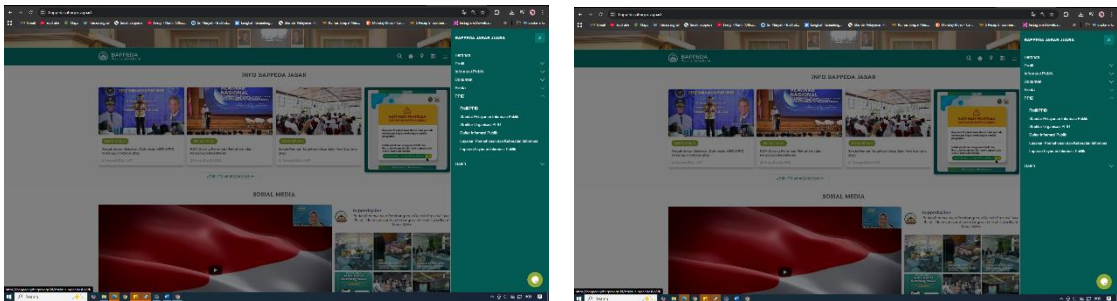
Gambar 5. Parkir Khusus Disabilitas



Gambar 6. Panduan Bahasa Isyarat Abjad & Ketentuan Layanan Permohonan Informasi dengan Braille



Gambar 7. Display Maklumat Pelayanan, Permohonan Infromasi, Pengaduan



Gambar 8. Tampilan Website Bappeda Jabar yang Telah Dilengkapi dengan Audio untuk memudahkan Teman Netra Bappeda Jabar

Untuk mendukung sarana yang inklusif, Bappeda Jabar menyediakan jalur khusus kursi roda bagi pengunjung berkebutuhan khusus. Selain pelayanan informasi yang dilakukan secara langsung, permohonan informasi juga dilakukan melalui media elektronik, diantaranya:

1. Surat elektronik yang ditujukan ke alamat email bappeda@jabarprov.go.id permohonan informasi publik secara online melalui layanan PPID pada website bappeda.jabarprov.go.id;
2. Layanan Informasi dapat diakses melalui media sosial official Instagram: @bappedajabar , X: @bappedajabar , Youtube: BappedaJabar , Facebook: Bappeda Provinsi Jawa Barat , dan Tiktok : @bappedajabar

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAPPEDA JABAR

Langkah 1: Pemohon Informasi Publik mempersiapkan salinan/ photocopy identitas pemohon & pengguna informasi yang terdiri dari :

- a. Individu : KTP/ SIM/ Paspor
- b. Kelompok Orang : KTP/ SIM/ Paspor seluruh anggota kelompok pemohon Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon
- c. Organisasi Berbadan Hukum : Lembar Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM
- d. KTP/ SIM/ Paspor perwakilan pengurus/ anggota Badan Hukum AD/ART Organisasi

Langkah 2 : Pemohon Informasi Publik mendatangi desk layanan PPID dan mengisi formulir permohonan informasi.

Langkah 3: Desk Layanan PPID menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas permohonan

Langkah 4: Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka pemohon akan mendapatkan Nomor Pendaftaran dan Tanda Terima Permohonan

Langkah 5: Pemohon menunggu proses permohonan selama maksimal 10 hari kerja. PPID berhak menambah waktu selama maksimal 1 x 7 hari kerja apabila PPID membutuhkan waktu tambahan untuk menyusun keputusan terkait permohonan informasi tersebut dan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Langkah 6 Pemohon mendapatkan pemberitahuan mengenai ketersediaan informasi dan mendapatkan surat keputusan PPID terkait informasi yang dimohonkan

ANGGARAN PPID

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik pada Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2025, dianggarkan beberapa kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:.

1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					35.000.000,00				15.000.000,00	-20.000.000,00
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000,00				0,00	-20.000.000,00
	[-] Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 1 Unit					20.000.000,00				0,00	-20.000.000,00
	Publikasi di Televisi Spesifikasi : Tv Daerah; Talkshow; Siaran Program.	2 Per Tayang	Per Tayang	10.000.000,00	-	20.000.000,00	-	Per Tayang	10.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.000.000,00				15.000.000,00	0,00
	[-] Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 1 Unit					15.000.000,00				15.000.000,00	0,00
	Radio Talkshow Daerah Spesifikasi : Radio Talkshow Daerah, Prime Time	1 Per Tayang	Per Tayang	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Per Tayang	Per Tayang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Anggaran Fasilitas Kunjungan Tamu

1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					328.200.000,00				229.740.000,00	-98.460.000,00
	[#] Fixed Cost Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					328.200.000,00				229.740.000,00	-98.460.000,00
	[-] Tamu yang Terlayani dan Terfasilitasi - 1 Laporan					328.200.000,00				229.740.000,00	-98.460.000,00
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Jamuan Tamu	25 Orang x 16 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	20.000,00	-	96.000.000,00	20 Orang x 14 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	20.000,00	67.200.000,00	-28.800.000,00
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Jamuan Tamu	9 Orang x 10 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	15.000,00	-	16.200.000,00	84 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	15.000,00	11.340.000,00	-4.860.000,00

Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	[-] Unit Kerja yang Terlayani Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 1 Unit					130.800.000,00				124.800.000,00	-6.000.000,00
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama...	20 Orang x 7 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	20.000,00	-	33.600.000,00	20 Orang x 8 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	20.000,00	38.400.000,00	4.800.000,00
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	20 Orang x 9 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	45.000,00	-	97.200.000,00	20 Orang x 8 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	45.000,00	86.400.000,00	-10.800.000,00
	[-] Unit Kerja yang Terukur IKM - 1 unit					15.600.000,00				15.600.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama...	20 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	20.000,00	-	4.800.000,00	30 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	20.000,00	4.800.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi - Makan Spesifikasi : Rapat Biasa, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam	20 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	45.000,00	-	10.800.000,00	30 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	45.000,00	10.800.000,00	0,00

Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					75.000.000,00				27.000.000,00	-48.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					75.000.000,00				27.000.000,00	-48.000.000,00
	[#] Kegiatan Prioritas Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					75.000.000,00				27.000.000,00	-48.000.000,00
	[-] ASN yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Mengenai Tugas dan Fungsi - 50 org (1 Dokumen di Akhir Tahun)					75.000.000,00				27.000.000,00	-48.000.000,00
	Biaya Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Tipe 1	10 Orang	Orang	2.500.000,00	-	25.000.000,00	-	Orang	2.500.000,00	0,00	-25.000.000,00
	Biaya Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Tipe 2	5 Orang	Orang	3.000.000,00	-	15.000.000,00	2 Orang	Orang	3.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00
	Biaya Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Tipe 3	10 Orang	Orang	3.500.000,00	-	35.000.000,00	-	Orang	3.500.000,00	0,00	-35.000.000,00
	Biaya Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Tipe 7	-	Orang	0,00	-	0,00	3 Orang	Orang	7.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama periode semester I tahun 2025, Bappeda Jabar terus aktif melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang meminta informasi seputar informasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Jawa Barat. Berdasarkan rekapitulasi Layanan Permohonan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Bappeda Jabar semester I tahun 2025, terdapat 45 (empat puluh lima) permohonan informasi publik yang terdaftar. Seluruh permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana Bappeda Jabar ditanggapi dengan baik di mana pemohon informasi sebagian besarnya merupakan kategori individu. Berikut merupakan rinciannya:

Tabel 2. Jumlah Permohonan Informasi

Bulan	Jumlah Pemohon	Jenis Pemohon	
		Individu	Badan Hukum
Januari	7	7	0
Februari	7	7	0
Maret	6	6	0
April	6	5	1
Mei	11	11	0
Juni	5	5	0
Total	42	41	1

Berdasarkan table diatas, selama semester I tahun 2025 PPID Pelaksana Bappeda Jabar menerima 42 permohonan resmi yang terdaftar melalui desk PPID. Adapun pemohon yang melakukan permohonan informasi didominasi oleh individu/perseorangan sebanyak 41 orang dengan rata-rata kebutuhan untuk penelitian tugas akhir maupun tugas kuliah.

Tabel 3. Rata-rata waktu menjawab Permohonan Informasi

Bulan	Jumlah Waktu Menjawab (hari)
Januari	4
Februari	5
Maret	5
April	5
Mei	4
Juni	4
Rata-rata	4.5

Berdasarkan table 3, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh PPID Pelaksana Bappeda Jabar untuk menjawab permohonan informasi yang masuk melalui desk PPID adalah 4,5 hari.

Tabel 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan, Dikabulkan Sebagian, Ditolak, dan Alasan Ditolak berdasarkan Bulan pada Semester I tahun 2025

Bulan	Jumlah Permohonan	Permohonan			Alasan Ditolak
		Dikabulkan	Sebagian	Ditolak	
Januari	7	7	-	-	-
Februari	7	7	-	-	-
Maret	6	6	-	-	-
April	6	6	-	-	-
Mei	11	11	-	-	-
Juni	5	5	-	-	-
Total	42	42	0	0	-

Berdasarkan table 4 menunjukkan bahwa PPID Pelaksana Bappeda Jabar memenuhi seluruh permohonan informasi terdaftar. Hal ini dikarenakan oleh ketersediaan data yang dapat difasilitasi oleh internal Bappeda Jabar sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi.

Tabel 5. Jumlah Permohonan Keberatan serta Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada KI, PTUN, dan MA berdasarkan Bulan pada Semester I tahun 2025

Bulan	Jumlah Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi		
		KI	PTUN	MA
Januari	0	-	-	-
Februari	0	-	-	-
Maret	0	-	-	-
April	0	-	-	-
Mei	0	-	-	-
Juni	0	-	-	-
Total	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel 5 Jumlah Permohonan Keberatan serta Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada KI, PTUN, dan MA berdasarkan Bulan tahun 2025 Bappeda Jabar tidak mendapatkan permohonan keberatan atas informasi dari pemohon.

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

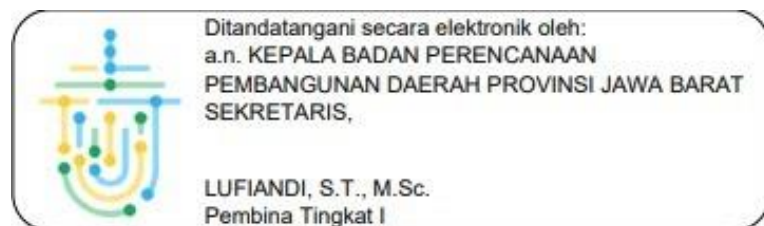
1. Kendala Internal yakni disposisi permohonan informasi terkadang langsung ke bidang terkait dan tidak melalui PPID, sehingga tanggal pemebrian informasi ada yag tidak tercatat.
2. Koordinasi antar bidang masih belum optimal untuk menjawab permohonan data dikarenakan keterbatasan wewenang.
3. Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang tugas di PPID seringkali terabaikan / terbengkalai.
4. Hambatan Eksternal yaitu terdapat pemohon informasi yang memberikan surat tidak melalui PPID sehingga PPID mengalami kendala untuk menghubungi pemohon informasi karena data yang diberikan tidak lengkap.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT

1. Dibutuhkan koordinasi dan bimbingan lebih intensif dengan PPID Utama, sehingga siap melakukan pelayanan informasi publik dengan sumber daya manusia, sarana, dan prasaranan yang ada.
2. Diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik pada unit teknis (unit pemilik informasi), sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Penyusunan materi dasar keterbukaan informasi publik dan implementasinya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam berbagai bentuk media komunikasi, sehingga dapat dijadikan panduan bagi seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Perlunya pendalaman serta standardisasi materi keterbukaan informasi publik yang disampaikan pada diklat kehumasan.

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIS,

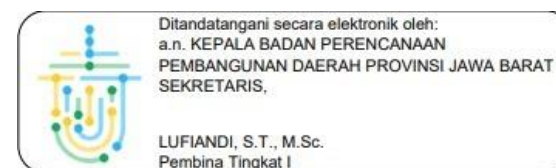


LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI SEMESTER I TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

No	Bulan Register Pemohon	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (Hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Alasan Ditolak
							KI	PTUN	MA	
1	Januari	7	4	7	0	0	0	0	0	-
2	Februari	7	5	7	0	0	0	0	0	-
3	Maret	6	5	6	0	0	0	0	0	-
4	April	6	5	6	0	0	0	0	0	-
5	Mei	11	4	11	0	0	0	0	0	-
6	Juni	5	4	5	0	0	0	0	0	-
TOTAL		42	4.5	42	0	0	0	0	0	0

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIS,



No	Tanggal Permohonan	Nama/ Badan Hukum Pemohon	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Di Bawah Pengawasan		Belum Didokumentasikan	Hardcopy	Softcopy	Melihat/ Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	7 Januari 2025	Nidaul Husna / Universitas Diponegoro	Jl. Batan III No. 14 Kota Depok	087871139422	Mahasiswa	Informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo	Skripsi										Jumat, 17 Januari 2025			
2	8 Januari 2025	Salsabiila Raudhatul Jannah / UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Jl. Ciganitri No. 200	085282223577	Mahasiswa	Wawancara terkait mitigasi bencana sesar lembang	Skripsi	√									Jumat, 10 Januari 2025			
3	16 Januari 2025	Delliq Hastariq Atfhal / UNPAD	Jl. Sukagalih No.29A 004/004, Kel. Sukabungah, Kec. Sukajadi, Kota Bandung	081222885024	Mahasiswa	Perencanaan Pembangunan BRT Bandung Raya	Skripsi										Jumat, 23 Januari 2025			
4	20 Januari 2025	Asep Kurniawan / The Smeru Research Institute	Jl. Cikini Raya No. 10 A Jakarta Pusat 10330	081282634435	Peneliti	Kebijakan daerah terkait posisi pencapaian pekerja perawatan berbayar dalam ekonomi ketenagakerjaan	kebutuhan studi										Jumat, 24 Januari 2025			
5	22 Januari 2025	Ramaditya Rahardian, S.Sos. .M.Kp., dkk / Universitas Muhammadiyah Bandung	-	-	Mahasiswa	-	Penelitian										Jumat, 24 Januari 2025			
6	22 Januari 2025	Adil Rabbani	Pondok Barokah, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Sayang, Jatinangor, Sumedang	081383975433	Mahasiswa	Peta penggunaan lahan Kab. Garut (2014 - 2023) Peta jenis tanah Kab. Garut (2014 - 2023)	Penelitian										Kamis, 23 Januari 2025			
7	30 Januari 2025	Sri Yolan Polapa / UNPAS	Jl. Sukahaji Wetan No. 38 Kota Bandung	089506973450	Mahasiswa	Wawancara terkait agile governace pada pemerintah Provinsi Jawa Barat	Disertasi										Selasa, 4 Februari 2025			
8	11 Februari 2025	Cicilia Nababan / ITB	Grand Cinunuk Residence Block C No. 2 Desa Cinunuk Kec. Cileunyi, Kab.	083894379502	Mahasiswa	Peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, laju erosi, laju sedimentasi DAS Cisangkuy Kabupaten Bandung	Tugas Akhir										Kamis,13 Februari 2025			

[illegible]

[illegible]

		Siber Syekh Nurjati Cirebon	Sembung Kab. Cirebon																
34	22 Mei 2025	Aulia Fatima Azzahra / UPI	Jl. Mandala IV No. 99	085721218494	Mahasiswa	Data Shapefile tutupan lahan sesar lembang dan kab. Bandung Barat tahun 2014-2024	Skripsi												
35	23 Mei 2025	Khalda Meida Nurfitri / STIA LAN Bandung	Jl. Sukahaji Kulon No. 11 Sukasari Kota Bandung 40152	0882001337157	Mahasiswa	Evaluasi Program Pengukuran Kinerja dan Anggaran Menggunakan Internal Sae di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Skripsi												
36	27 Mei 2025	Saska Shafira Rizkia / ITB	Jl. SD Muarajeun No. 2A Rt.04 Rw. 08 Kota Bandung	081312765578	Mahasiswa	Jenis Kegiatan, Jumlah dan Sumber Dana, Lokasi Program CSR	Tesis												
37	28 Mei 2025	Rhafidzar Muhammad Alfathoni / Universitas Ibrahimy	Gg. Sukaasih II Rt. 04 Rw.10 Kel. Cicaheum, Kec. Kiaracondong	082116816725	Mahasiswa	Pembangunan kantor bertema biophilic	Skripsi												
38	2 Juni 2025	Isni Maulidini / Universitas Langlangbuana	Dusun Andir Rt.02/08 Kelurahan Rancamulya, Kec. Sumedang Utara	085716680236	Mahasiswa	Wawancara dan Pra Survei terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai	Skripsi												
39	3 Juni 2025	Nawal Syafiq Farihan / Universitas Terbuka	Kp. Sukanagaea No. 48 Rt/Rw. 002/0011 Desa Mekarsari Kec. Pacet Kab. Bandung	083822158136	Mahasiswa	File SHP penggunaan lahan dan jenis tanah kawasan Bandung Utara (KBU) 2024	Skripsi												
40	4 Juni 2025	Clarissa Andarini / UPI	Kp. Anyar Rt. 03 Rw. 05 Desa Ciderum, Kec. Caringin, Kab. Bogor	085697675739	Mahasiswa	Data batas administrasi DAS Cimadiri, penggunaan lahan, kemiringan lereng, ketinggian lahan, jenis tanah, curah hujan, peta area terdampak	Skripsi												
41	23 Juni 2025	Hasna Hana Hazimah Kurniadi/ Universitas Lampung	Perum BPI Blok B No. 5 Pasanggrahan, Kec. Cilawu, Kab. Garut	082127477337	Mahasiswa	Data Peta Jenis Tanah, Data Peta Administrasi Provinsi Jawa Barat, dan Pengisian Kuesioner	Skripsi												
42	26 Juni 2025	Qayla Amira Rafida / Universitas Widyatama	Komplek Permata Kopo Blok A2-61B, Kab. Bandung	085872400916	Mahasiswa	Kuisiонер Kepuasan Kerja Karyawan, data penilaian kinerja karyawan, dll	Skripsi												

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,

LUFIANDI, S.T., M.Sc.
Pembina Tingkat I

REGISTRASI KEBERATAN SEMESTER I TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

No.	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	No. Pendaftaran Permintaan Informasi	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan pengajuan keberatan	Keputusan Atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan Atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Permohonan Informasi
NIHIL												

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,



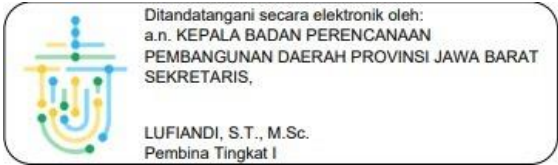
Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,

LUFIANDI, S.T., M.Sc.
Pembina Tingkat I

LAPORAN SENGKETA INFORMASI SEMESTER I TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

No.	Tanggal	No. Registrasi	Pemohon	Termohon	Keterangan
NIHIL					

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,



**DAFTAR PELANGGARAN YANG DILAPORKAN MASYARAKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024-2025**

No	Tanggal	Pelapor	Keluhan	Sumber Laporan
NIHIL				

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,

LUFIANDI, ST., M.Sc.
Pembina

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

A. WAJIB BERKALA

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		RETENSI ARSIP	UNDUH
					CETAK	DIGITAL		
Profil Badan Publik								
1	Kedudukan domisili beserta alamat lengkap Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif Selama Masih Berlaku (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat musnah	Lihat
2	Alamat Unit Satuan kerja pejabat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif Selama Masih Berlaku (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat musnah	Lihat
3	Visi Misi Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	2 tahun Peraturan Baru, 3 tahun inaktif sifat permanen	Lihat
4	Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah peaturan tidak berlaku(UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat permanen	Lihat
5	Ruang Lingkup dan Sejarah Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	2 tahun Peraturan Baru, 3 tahun inaktif sifat permanen	Lihat
6	Unit Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	3 tahun Peraturan Baru, 3 tahun inaktif sifat permanen	Lihat
7	Bagan struktur Organisasi	Sekretariat	Sekretaris Bappeda	2025, Kota	-	√	2 Tahun Setelah Penetapan (UP),	Lihat

	Bappeda Provinsi Jawa Barat	Bappeda Provinsi Jawa Barat	Jabar	Bandung			3 tahun inaktif (UK) permanen	
8	Profil singkat pejabat struktural Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	2 Tahun Setelah Penetapan (UP), 3 tahun inaktif(UK), sifat permanen	Lihat
9	LHKPN Hasil Verifikasi KPK	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	2 Tahun Setelah Penetapan (UP), 3 tahun inaktif(UK), sifat permanen	Lihat
10	Denah Kerja Gedung Bappeda	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	√	-	Selama Masih Dimiliki (Arsip Vital) Permanen	
Ringkasan Informasi tentang Program dan Kegiatan								
11	RENSTRA Bappeda Provinsi Jawa Barat 2024-2026	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2023, Kota Bandung	-	√	2 tahun aktif (UP), 5 tahun inaktif (UK), sifat permanen	Lihat
12	RENJA Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2025	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2024, Kota Bandung	-	√	2 tahun aktif (UP), 2 tahun inaktif (UK), sifat Musnah	Lihat
13	Laporan Evaluasi Renja Triwulan Tahun 2024	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	1 tahun aktif (UP), 2 tahun inaktif (UK), sifat Permanen	Lihat
14	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Jawa Barat 2024	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	2 tahun aktif (UP), 2 tahun inaktif (UK), sifat Musnah	Lihat
15	Dokumen LKPJ Tahun 2024	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	2 tahun Peraturan Baru (UP) 3 tahu inaktif (UK) sifat Permanen	Lihat
16	Dokumen Pengelolaan Resiko Tahun 2024	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2024, Kota Bandung	-	√	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat Permanen	
18	Agenda Penting terkait	Sekretariat	Sekretaris Bappeda	2024, Kota	-	√	2 tahun setelah Perda tentang	Lihat

	Pelaksanaan Tugas Badan Publik	Bappeda Provinsi Jawa Barat	Jabar	Bandung			pertanggungjawaban (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat Permanen	
19	Informasi Khusus Lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2024, Kota Bandung	-	√	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat Permanen	Lihat
20	Informasi tentang Penerimaan Calon Pegawai dan/atau Pejabat Badan Publik Negara	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2024, Kota Bandung	-	√	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat Permanen	Lihat
21	Anggaran: Sumber & Jumlah	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2024, Kota Bandung	-	√	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat Permanen	Lihat
22	Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2024, Kota Bandung	-	√	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat Permanen	Lihat
Ringkasan Laporan Keuangan								
23	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan , dan tindak lanjut hasil pemeriksaa telah selesai (up), 5 tahun inaktif (UK) sifat permanen	Lihat
24	Neraca	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan , dan tindak lanjut hasil pemeriksaa telah selesai (up), 5 tahun inaktif (UK) sifat permanen	Lihat

25	Laporan Arus Kas/CALK	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan , dan tindak lanjut hasil pemeriksaa telah selesai (up), 5 tahun inaktif (UK) sifat permanen	Lihat
26	Daftar Aset & Investasi	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif selama masih dimiliki, sifat permanen	Lihat
27	RKA	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai (up), 3 tahun inaktif (uk) sifat Dinilai Kembali	Lihat
28	DIPA	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai (up), 3 tahun inaktif (uk) sifat Dinilai Kembali	Lihat
29	Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2025	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	2 tahun aktif (UP), 2 tahun inaktif (UK), sifat Musnah	Lihat
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2024 - 2025								
30	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	1 Tahun aktif (UP), 4 tahun inaktif (UK), sifat Dinilai Kembali	Lihat
31	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	1 Tahun aktif (UP), 4 tahun inaktif (UK), sifat Dinilai Kembali	Lihat
32	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	1 Tahun aktif (UP), 4 tahun inaktif (UK), sifat Dinilai Kembali	Lihat

	Permintaan Informasi Publik yang ditolak;							
33	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	1 Tahun aktif (UP), 4 tahun inaktif (UK), sifat Dinilai Kembali	Lihat
Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik								
34	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan;	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2024, Kota Bandung	-	√	2 Tahun	Lihat
35	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2024, Kota Bandung	-	√	2 Tahun	Lihat
Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Badan Publik								
36	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik;	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	2 Tahun	Lihat
37	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari SKPD Provinsi yang bersangkutan.	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	2 Tahun	Lihat
Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat								
38	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah peraturan tidak berlaku (up), 3 tahun inaktif (uk) sifat permanen	Lihat

39	Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah kebijakan lama tidak berlaku (up). 3 tahun inaktif (uk) sifat permanen	Lihat
40	Informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat Permanen	Lihat

B. SETIAP SAAT

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		RETENSI ARSIP
					CETAK	DIGITAL	
SEKRETARIAT							
1	Daftar Informasi Publik	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	1 Tahun aktif (UP), 4 tahun inaktif (UK), sifat Dinilai Kembali
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik							
2	Naskah akademik, kajian, atau pertimbangan yang mendasari peraturan	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah kebijakan lama tidak berlaku (up). 3 tahun inaktif (uk) sifat permanen
3	Dokumen masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah kebijakan lama tidak berlaku (up). 3 tahun inaktif (uk) sifat permanen

4	Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah kebijakan lama tidak berlaku (up). 3 tahun inaktif (uk) sifat permanen
5	Rancangan peraturan, keputusan kebijakan yang dibentuk;	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah kebijakan lama tidak berlaku (up). 3 tahun inaktif (uk) sifat permanen
6	Tahapan perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah kebijakan lama tidak berlaku (up). 3 tahun inaktif (uk) sifat permanen
7	Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah kebijakan lama tidak berlaku (up). 3 tahun inaktif (uk) sifat permanen
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian :							
8	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah kebijakan lama tidak berlaku (up). 3 tahun inaktif (uk) sifat permanen
9	Profil pimpinan dan pegawai	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	2 Tahun Setelah Penetapan (UP), 3 tahun inaktif(UK), sifat permanen
10	Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2024, Kota Bandung	-	√	aktif 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai (up), 3 tahun inaktif (uk) sifat Dinilai Kembali
11	Surat menyurat pimpinan atau	Sekretariat Bappeda	Sekretaris Bappeda	2025, Kota	-	√	

	pejabat SKPD Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya Tahun 2024-2025	Provinsi Jawa Barat	Jabar	Bandung			
12	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2024-2025;	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	
13	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2024-2025;	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	
14	Data perbendaharaan atau inventaris 2024- 2025.	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	aktif selama masih dimiliki, sifat permanen
15	Dokumen rencana strategis SKPD Provinsi yang masih berlaku	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2024, Kota Bandung	-	√	2 tahun aktif (UP), 5 tahun inaktif (UK), sifat permanen
16	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	1 Tahun aktif (UP), 4 tahun inaktif (UK), sifat Dinilai Kembali
17	Informasi tentang standar pengumuman Informasi	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	1 Tahun aktif (UP), 4 tahun inaktif (UK), sifat Dinilai Kembali
18	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	1 Tahun aktif (UP), 4 tahun inaktif (UK), sifat Dinilai Kembali
19	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2025, Kota Bandung	-	√	1 Tahun aktif (UP), 4 tahun inaktif (UK), sifat Dinilai Kembali

20	Laporan Kearsipan Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2024, Kota Bandung	-	√	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai aktif, 3 tahun inaktif sifat dinilai kembali
21	Daftar buku perpustakaan Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2024, Kota Bandung	-	√	2 tahun pembaharuan data aktif (UP) 3 tahu inaktif (UK) sifat permanen
22	Peta Jabatan di Lingkungan Bappeda Jabar	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2024, Kota Bandung	-	√	2 tahun Peraturan Baru (UP) 3 tahu inaktif (UK) sifat Permanen
23	Agenda Kerja pimpinan Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Bappeda Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Bappeda Jabar	2024, Kota Bandung	-	√	2 tahun aktif (UP), 2 tahun inaktif (UK), sifat Musnah
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
25	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2025-2029	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2025, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
26	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Perubahan Tahun 2025	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2024, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
27	RPJPD 2025-2045	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2024, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
28	Perubahan RKPD Tahun 2024	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan	2024, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 5 tahun inaktif (UK),

		Pembangunan Daerah	Evaluasi Pembangunan Daerah				sifat permanen
29	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2023, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
30	RPD 2024-2026	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2023, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
31	Perubahan RKPD Tahun 2023	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2023, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 5 tahun inaktif (UK), sifat permanen
32	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2022, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
33	Perubahan RKPD Tahun 2022	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2022, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 5 tahun inaktif (UK), sifat permanen
34	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2021, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen

35	Perubahan RKPD Tahun 2021	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2021, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 5 tahun inaktif (UK), sifat permanen
36	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2020, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
37	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2017, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
38	RPJPD 2005-2025	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2004, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
39	Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2023, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA							
40	Rencana Aksi Daerah Kelanjutusiaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (proses penentapan)	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2024, Kota Bandung	√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
41	Grand Desain Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	Kepala Bidang Pemerintahan dan	2024, Kota Bandung	√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru

	Barat 2025-2045 (proses penetapan di biro hukum)	Manusia	Pembangunan Manusia				(UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
42	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2023, Kota Bandung	√	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
43	Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan 2024-2025	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2023, Kota Bandung	√	√	aktif sampai 2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru (UK), 8 Tahun inaktif (UK), sifat Permanen
BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM							
44	Masterplan Pertanian 2020	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	-	√	√	aktif samapai 2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 Tahun inaktif (UK), sifat Permanen
45	Dokumen Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahunan	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	-	-	√	aktif sampai 5 tahun setelah audit (UP), 5 tahun inaktif (UK), sifat Musnah
46	Laporan CSR Tahun 2024	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2025, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah kegiatan selesai (UP), 3 tahun inaktif (UK) sifat permanen
47	Strategi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Jawa Barat 2025-2029	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2024, Kota Bandung	-	√	aktif samapai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan kegiatan selesai (UP), 3 Tahun inaktif (UK), sifat Musnah
48	Peta Jalan Ekonomi Biru (2024)	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan	2024, Kota Bandung	-	√	aktif samapai 2 Tahun Setelah Ditetapkan

			Sumberdaya Alam				Peraturan Baru (UP), 3 Tahun inaktif (UK), sifat Permanen
49	dokumen Peta Jalan Pengembangan UMKM, IKM dan Ekonomi Kreatif 2025-2029 (tahun 2024)	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2024, Kota Bandung	-	√	aktif samapai 2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru (UP), 3 Tahun inaktif (UK), sifat Permanen
50	Policy Brief Dampak Sosial Ekonomi dari Keberadaan Bank Emok (2024)	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2024, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 Tahun Setelah pelaksanaan kegiatan (UP), 3 Tahun inaktif (UK), sifat musnah
51	Policy Brief Implikasi Paylater di Jawa Barat (2024)	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2024, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 Tahun Setelah pelaksanaan kegiatan (UP), 3 Tahun inaktif (UK), sifat musnah
52	Perhitungan AHP untuk Revitalisasi UPTD dalam Lingkup PSDA (2024)	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2024, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 Tahun Setelah pelaksanaan kegiatan (UP), 3 Tahun inaktif (UK), sifat musnah
53	Dokumen RAD-PG Tahun 2023	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2023, Kota Bandung	-	√	aktif samapai 2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru (UP), 3 Tahun inaktif (UK), sifat Permanen
54	Kerangka Ekonomi Biru Jawa Barat (2023)	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2023, Kota Bandung	-	√	aktif samapai 2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 Tahun inaktif (UK), sifat Permanen
55	Roadmap Pengembangan Ekosistem Program Petani	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan	2022, Kota Bandung	-	√	aktif samapai 2 Tahun Setelah Ditetapkan

	Milenial Provinsi Jawa Barat (2022)		Sumberdaya Alam				Peraturan Baru (UP), 8 Tahun inaktif (UK), sifat Permanen
56	Background Study RPJMD 2023-2028 Provinsi Jawa Barat lingkup sektor Pertanian serta Kelautan dan Perikanan (2021)	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2021, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
57	Potensi Lingkup Sektor Pertanian serta Kelautan dan Perikanan (2021)	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2021, Kota Bandung	-	√	aktif samapai 2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 Tahun inaktif (UK), sifat Permanen
58	Rencana Pangan Jabar (2021)	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2021, Kota Bandung	-	√	aktif samapai 2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 Tahun inaktif (UK), sifat Permanen
59	Dokumen Evaluasi SDA Jawa Barat 2018	Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	2018, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 1 tahun (UP), 2 tahun inaktif (UK), sifat Musnah
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN							
60	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat (Perda no. 22 Tahun 2010)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2010, Kota Bandung	-	√	2 tahun setelah kebijakan lama tidak berlaku (UP), 3 tahun inaktif (UP) sifat Permanen
61	Rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Cilamaya 2025-2029	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2024, Kota Bandung	-	√	aktif sampai 5 tahun setelah kebijakan lama tidak berlaku (UP), 5 tahun inaktif (UK), sifat permanen
62	Memorandum of	Bidang Infrastruktur	Kepala Bidang	2024, Kota	-	√	2 tahun setelah kebijakan

	Understanding Bappeda Prov. Jawa Barat	dan Kewilayahan	Infrastruktur dan Kewilayahan	Bandung			lama tidak berlaku (UP), 3 tahun inaktif (UP) sifat Permanen
63	Background Study RPD Tahun 2023 Sektor Sumber Daya Air	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2023, Kota Bandung	–	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
64	Background Study RPD Tahun 2023 Sektor Perhubungan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2023, Kota Bandung	–	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
65	Background Study RPD Sektor Bina Marga	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2023, Kota Bandung	–	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
66	Background Study RPD Tahun 2023 Sektor Perumahan dan Pemukiman	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2023, Kota Bandung	–	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
67	Background Study RPD Tahun 2023 Sektor Lingkungan Hidup	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2023, Kota Bandung	–	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
68	Background Study RPD Tahun 2023 Sektor Kehutanan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2023, Kota Bandung	–	√	aktif sampai 2 tahun setelah ditetapkan Peraturan Baru (UP), 8 tahun inaktif (UK), sifat permanen
69	Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Provinsi Jawa Barat (2023)	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2023, Kota Bandung	–	√	aktif sampai 5 tahun setelah kebijakan lama tidak berlaku (UP), 5 tahun inaktif (UK), sifat permanen

70	Laporan Akhir Renaksi PPK DAS Citarum 2024	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2023, Kota Bandung	–	√	aktif sampai 2 tahun setelah pengelolaan sungai selesai (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat permanen
71	Laporan Akhir Renaksi PPK DAS Citarum 2023	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2023, Kota Bandung	–	√	aktif sampai 2 tahun setelah pengelolaan sungai selesai (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat permanen
72	Laporan Akhir Renaksi PPK DAS Citarum 2022	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2022, Kota Bandung	–	√	aktif sampai 2 tahun setelah pengelolaan sungai selesai (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat permanen
73	Laporan Akhir Renaksi PPK DAS Citarum 2021	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2021, Kota Bandung	–	√	aktif sampai 2 tahun setelah pengelolaan sungai selesai (UP), 3 tahun inaktif (UK), sifat permanen

C. SERTA MERTA

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		RETENSI ARSIP
					CETAK	DIGITAL	
BELUM TERSEDIA							

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,

LUFIANDI, S.T., M.Sc.
Pembina Tingkat I

